

**Bab
III**

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ketapang

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan Renstra, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis kondisi daerah, dan masukan dari seluruh unit kerja (Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang) maupun *stakeholders* di wilayah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Selain itu hal – hal yang terkait dengan isu-isu strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan yang menunjang terselenggaranya kegiatan Pemerintahan yang merupakan hasil forum rembuk antara pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*).

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Secara eksternal, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang juga dihadapkan pada tuntutan perubahan sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi. Tuntutan perubahan dimaksud, sebetulnya dapat berujung kepada dua hal utama, yakni dapat berwujud sebagai peluang, tetapi sekaligus merupakan ancaman bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten Sampang. Hal ini dapat menjadi peluang apabila arus perubahan tersebut disikapi secara sadar dan hati-hati, yang kemudian disesuaikan dengan perubahan arah kebijakan daerah dalam rangka penguatan jejaring (kemitraan dengan pihak luar) untuk peningkatan perekonomian daerah yang muara akhirnya adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat Sampang secara umum.

Akan tetapi, juga bisa menjadi ancaman serius apabila pemerintah dan masyarakat Sampang tidak menyikapinya secara sadar dan hati-hati. Salah satu bentuk konkrit dari ancaman dimaksud adalah ancaman akan hilangnya berbagai peluang kerjasama di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dll. dengan pihak lain, yang sesungguhnya semua itu jika dikelola dengan baik (saling sinergis) tentu akan melahirkan prinsip saling menguntungkan dalam arti seluas-luasnya.

Pasca beroperasinya jembatan Suramadu, misalnya, berbagai peluang pasar dan investasi tentu akan semakin terbuka. Arus perdagangan dan jasa serta berbagai jenis industri tentu akan banyak mengalir di Madura, tak terkecuali di kabupaten Sampang. Hal ini tentu merupakan peluang yang tak boleh diabaikan demi kemajuan kabupaten Sampang, dalam arti sesungguhnya. Sehingga distribusi peran (Tupoksi) yang menjadi bidang kewenangan aparat juga harus disesuaikan dengan tingkat keahlian aparat itu, agar motivasi, disiplin, dan etos kerja aparat benar-benar diarahkan ke produktivitas kerja yang optimal.

Oleh karena itu, produktivitas aparat yang optimal juga diarahkan untuk mewujudkan kesalingketerpaduan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Sampang secara umum. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan yang disertai niat tulus untuk menyikapi berbagai persoalan (internal dan eksternal) seperti telah diuraikan di atas.

Terkait upaya mewujudkan dan mendinamisir tata pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*), salah satu faktor penting yang bisa dijadikan pendukung adalah memposisikan SKPD-SKPD sebagai kompetitor. Dalam artian, setiap SKPD dapat saling bersaing memunculkan berbagai program dan kegiatan strategis baru yang lebih inovatif berdasarkan potensi unggulan di wilayah kewenangan SKPD itu. Akan tetapi selalu disertai saling koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD. Melalui pendekatan seperti ini, setidaknya ego sektoral masing-masing SKPD dapat ditekan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Ketapang menggunakan analisis lingkungan strategis (*Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;

2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Ketapang yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya SDM di bidang ilmu pengetahuan teknologi para aparatur Kecamatan Serta Sarana dan prasarana yang kurang memadai
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan;
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan;
8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Sampang sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Ketapang
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. Faktor Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Ketapang;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ketapang perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Ketapang adalah :

- a. Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur.
- b. Usulan prioritas hasil musrenbangcam yang tidak terakomodasi dalam musrenbangkab.
- c. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas;
- d. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD tertuang sebagaimana dalam Tabel T.3.1

3.2. Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sampang

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Sampang sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Sampang. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Sampang kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2013 – 2018 adalah “Mewujudkan sistem birokrasi yang sehat, masyarakat yang kuat, dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara;
- b. Masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat menghadapi tantangan dan mampu mengatasi hambatan/rintangan dalam mencapai tujuan negara;
- c. Penataan ruang dan lingkungan yang berjalan selaras seimbang sehingga program pemanfaatan lingkungan dapat dilaksanakan secara optimal;
- d. Kondisi masyarakat Kabupaten Sampang yang berakhlak mulia, aparturnya bersih dan berwibawa serta diperhitungkan, dihargai, dan dihormati dalam pergaulan di luar Kabupaten Sampang.

Masyarakat Kabupaten Sampang, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini

memerlukan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kabupaten Sampang kedepan adalah sinkronisasi hubungan antaran manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan sang Pencipta-Nya.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Sampang “Mewujudkan sistem birokrasi yang sehat, masyarakat yang kuat, dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat”, terdapat 5 Misi yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi:

- a. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
- b. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah dan daya dukung lingkungan;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan.

Keterkaitan visi dan misi Kabupaten Sampang dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan Ketapang dijabarkan dalam tabel T.3.2

Pada prinsipnya misi pembangunan Kabupaten Sampang ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang *pro growth*, *pro poor* dan *pro governance*. Pembangunan *pro growth* (pro pertumbuhan) dilaksanakan dengan menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. *Pro poor* (pro kemiskinan) ditindaklanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan *pro governance* (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat Kabupaten Sampang.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Review Mengenai Faktor Faktor dari pelayanan SKPD yang Mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD.

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Ketapang saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

1. Kondisi Yang Diinginkan

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- c) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
 1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.

2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Ketapang

- a) Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
- b) Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- d) SKPD Kecamatan sebagai tangan panjang Bupati di wilayah harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

Isu-isu strategis yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Ketapang dibahas melalui

forum *Focussed Group Discussion (FGD)*, dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kualitas;
3. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari berkurangnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikan rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;